BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam sehingga kebutuhan pangan harus terjamin halal sifat dan hukumnya, mulai dari produksi sampai siap dikonsumsi. Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kehalalan suatu produk melalui jaminan produk halal berupa sertifikasi halal. Sertifikasi Halal adalah pengakuan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan dokumen legal kehalalan yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tidak hanya barang yang harus bersertifikat halal akan tetapi jasa juga harus bersertifikat halal seperti jasa Penyembelihan¹. Pemerintah Indonesia telah menetapkan perlindungan jaminan produk halal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan adanya sertifikasi halal akan menjamin bahwa produk yang dihasilkan sudah pasti halal dan semua proses sudah sesuai dengan syariat.

Bagi umat muslim, mengkonsumsi makanan halal merupakan sebagai bagian dari melaksanakan perintah Allah SWT. sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 88:

﴿۞﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu”².

Dan juga dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 118:

﴿۞﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat – ayat-Nya”³.

Dari dalil tersebut dijelaskan bahwa sebagai umat muslim, penting untuk mengkonsumsi daging hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan syariat islam.

¹ Nibras Nada Nailufar Tari Oktaviani, “Produk Yang Wajib Memiliki Sertifikat Halal,” Kompas.com, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/13/00300031/produk-yang-wajib-memiliki-sertifikat-halal>.

² Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al - Qur'an* (Jakarta, 2019), Al-Maidah Ayat 88.

³ Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al - Qur'an* (Jakarta, 2019) Al-An'am Ayat 118.

Di era globalisasi, menentukan kehalalan suatu produk pangan menjadi lebih kompleks dibanding saat teknologi belum berkembang. Oleh karena itu, produk pangan yang dikonsumsi umat Islam, penting untuk memiliki jaminan legalitasnya. Jaminan ini bisa diberikan melalui sertifikasi halal yang melekat pada produk tersebut, sehingga produsen dapat menampilkan logo halal pada kemasannya. Ini akan memberikan kepercayaan kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip halal yang telah diatur⁴.

Pada industri makanan saat ini, bahan makanan diolah dengan menggunakan teknologi canggih hingga siap dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia. Kenyataannya, sebagian besar produk pangan dari industri internasional tidak menerapkan sertifikasi halal. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dalam perdagangan bebas di pasar regional, internasional dan global. Akibatnya, di Indonesia, produk yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram dapat tersebar luas⁵.

Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola sistem jaminan produk halal, BPJPH bertanggungjawab untuk menerapkan, mengelola dan mengawasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Menerbitkan sertifikasi halal untuk produk yang memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal merupakan salah satu peran penting BPJPH⁶.

Bagi produsen dan konsumen, sertifikasi halal merupakan penanda penting untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar halal yang diakui oleh umat Islam. Menurut Kiai Marzuki, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang dikutip dari website *nu.or.id*⁷, kesalahan dalam penyembelihan hewan akan menyebabkan seseorang memakan bangkai. Dalam hukum Islam, bangkai hukumnya Najis dan memakan barang Najis hukumnya haram. Maka dari itu untuk mendapatkan daging yang halal, diperlukan adanya JULEHA (Juru Sembelih Halal) yang terlatih dan memahami proses penyembelihan sesuai dengan syariat agar kepastian hukum akan

⁴ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2014): 194, <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>.

⁵ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 106.

⁶ Komisi Fatwa MUI, "Standarisasi Fatwa Halal," *Fatwa MUI*, 2003.

⁷ Syarif Abdurrohman, "Kiai Marzuki Ingatkan Pentingnya Ilmu Dalam Proses Menyembelih Hewan," *nu.or.id*, 2022, <https://www.nu.or.id/daerah/kiai-marzuki-ingatkan-pentingnya-ilmu-dalam-proses-menyembelih-hewan-0ikzO>.

penyembelihan sudah terjamin sehingga menciptakan ketentraman batin masyarakat saat mengkonsumsinya⁸.

Sebagaimana yang ada dalam Pasal 19 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa *“hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan masyarakat veteriner”*. Ini berarti semua produk yang tersebar di Indonesia dan berasal dari hewan maka harus disembelih sesuai syariat, agar masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian bahwa makanan yang dikonsumsi halal, terutama masyarakat muslim.

Saat ini, terdapat banyak tempat terutama di Kabupaten Kudus mulai restoran dan kafe hingga warung makan sederhana, menyediakan menu berbahan dasar daging, telur dan susu yang merupakan makanan pangan hewani yang berasal dari usaha peternakan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan hewani, tidak hanya memperhatikan nilai gizinya saja, namun juga kehalalan makanan yang dikonsumsi. Jika dalam penyembelihan tidak sesuai dengan syariat maka makanan tersebut tidak halal dimakan terutama masyarakat muslim. Secara hukum, kehalalan daging sebagai bahan pangan telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan⁹. Dari data yang penulis peroleh dari website Media Indonesia bahwa 85% Rumah Potongan Hewan di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal, sehingga daging yang keluar dari Rumah Potongan hewan tersebut belum memiliki label halal maka daging dan turunannya yang siap dikonsumsi menjadi belum terjamin kehalalannya¹⁰.

Terkhusus di Kabupaten Kudus, masih banyak jasa penyembelihan hewan di Kabupaten Kudus yang belum bersertifikasi halal, salah satunya yaitu Usaha Dagang (UD) Mahesa Muda yang merupakan sebuah usaha peternakan hewan ternak kerbau, di peternakan tersebut memiliki jasa Penyembelihan Hewan. Hewan ternak yang biasanya disembelih di peternakan ini antara lain yaitu Kerbau dan Sapi. Karena peternakan ini khusus kerbau jadi produk penyembelihan lebih banyak kerbau. Jasa penyembelihan ini menjangkau konsumen baik di dalam kota maupun luar kota akan tetapi

⁸ Puthut Setyo Wibowo, “Juru Sembelih Halal,” disnakeswan.lebakkab.go.id, 2019, <https://disnakeswan.lebakkab.go.id/juleha-juru-sembelih-halal/>.

⁹ Arif Al Wasim, “Etika Penyembelihan Hewan Dan Jaminan Keamanan Pangan Dirasah Kitab Nazam Tazkiyah Karya KH. Ahmad Rifa’i (1786-1570),” *Jurnal Syariat* 1, no. 1 (2015): 143.

¹⁰ Zubaedah Hanum, “85% Rumah Potongan Hewan Belum Bersertifikasi Halal,” mediaindonesia.com, 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/478632/85-rumah-potongan-hewan-belum-memiliki-sertifikat-halal>.

jasa penyembelihan tersebut belum bersertifikasi halal. Penulis memilih Lokasi di UD. Mahesa Muda karena Lokasi tersebut bukan RPH (Rumah Potong Hewan) yang telah memiliki izin resmi melainkan usaha perseorangan yang berbentuk usaha dagang (UD). Di Lokasi tersebut juga memiliki kriteria permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus pada Jasa Penyembelihan Hewan UD. MAHESA MUDA Desa Banget Kaliwungu Kudus).

B. Fokus Penelitian

Agar memastikan pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus, penulis memusatkan penelitian pada pelaku UMKM Jasa Penyembelihan Hewan yang belum bersertifikasi halal. Penulis memilih objek penelitian di UD. MAHESA MUDA yang beralamat di Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penellitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Penyembelihan hewan yang ada di UD. Mahesa Muda?
2. Apasaja Kendala dan Solusi terkait jasa penyembelihan hewan di UD. Mahesa Muda?
3. Bagaimana Implementasi terkait UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di UD. Mahesa Muda?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyembelihan hewan yang ada di UD. Mahesa Muda?
2. Untuk mengetahui kendala dan Solusi terkait jasa penyembelihan hewan di UD. Mahesa Muda.
3. Untuk mengetahui penerapan UU JPH pada jasa penyembelihan hewan di UD. Mahesa Muda.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pembaca mengenai implementasi jaminan produk halal dalam jasa penyembelihan hewan.
 - b. Sebagai acuan referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang dan menambah literasi keilmuan.
 - c. Dapat memahami kendala yang dialami pelaku UMKM yang belum mensertifikasikan kehalalan usahanya.
 - d. Mengetahui perkembangan system jaminan produk halal di Indonesia dengan menganalisis berbagai regulasi yang mengaturnya.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai jaminan produk halal dan penyembelihan hewan yang halal.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis dan bagi pelaku UMKM jasa penyembelihan hewan agar jaminan halal dapat dipatuhi.

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam bentuk tulisan yang sistematis dan ilmiah, terdiri dari lima bab yang masing – masing terbagi menjadi beberapa subbab. Sistematika ini disusun guna memberi gambaran secara umum mengenai pokok pembahasan dalam hasil penelitian ini. Sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal akan mencakup cover (bagian luar dan dalam), lembar pengesahan proposal, pernyataan keaslian skripsi, abstrak penelitian, motto hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi, terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab kajian Teori ini, akan diuraikan tentang konsep-konsep yang terkait dengan teori penelitian, seperti jasa penyembelihan hewan, aspek jaminan kehalalan produk dan proses sertifikasi halal. Selain itu,

bab ini juga akan membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian dan kerangka berpikir dalam penelitian.

c. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengujian keabsahan data dan Teknik analisis data.

d. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum mengenai obyek penelitian, deskripsi dari data penelitian beserta analisis data penelitian mengenai jaminan produk halal pada jasa penyembelihan hewan yang belum bersertifikasi halal, kendala dan solusi pada UD. MAHESA MUDA di desa banget.

e. BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan yang mencakup dari keseluruhan isi dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang ditujukan kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisi daftar Pustaka dari keseluruhan referensi yang tercantum dalam penelitian ini, baik dari buku, jurnal ilmiah, website maupun yang lainnya. Kemudian dicantumkan daftar Riwayat hidup penulis beserta lampiran yang terkait dengan penelitian ini.